



## Ideologi, Bahasa dan Penyingkiran: Eksklusi Sosial Berbasis Bahasa yang Dihadapi Mahasiswa Asal Indonesia Timur di Pulau Jawa

Fajar Martha

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
fajar.martha@ui.ac.id

### Abstract

*This study examines language-based social exclusion endured by migrant students from East Indonesia in Java. It applies and enriches Bracic's (2020, 2022) multidimensional exclusion cycle model by highlighting language's central role as a key dimension of exclusion in the Indonesian context, an area not yet fully elaborated within her theoretical framework. Analysis reveals that, beyond difficulties in formal and vernacular Indonesian, these students encounter discriminatory racial prejudice. This discrimination stems from a historical javanization process implemented by the Sukarno and Soeharto governments, leading to language hierarchization, structural racism, and racial discrimination. This research argues that language, ideology, and power are intertwined, perpetuating the exclusion cycle against these marginalized groups. This study used literature review and semi-structured interviews, and found the need for multidimensional interventions targeting language hierarchies, racial prejudice, and structural racism to break this exclusion cycle and foster equitable inclusion.*

**Keywords:** Language; Social Exclusion; Ideology; Eastern Indonesian; Javanization

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji eksklusi sosial berbasis bahasa yang dihadapi mahasiswa perantau dari Indonesia Timur di Pulau Jawa. Studi ini mengaplikasikan dan memperkaya model siklus eksklusi multidimensi Bracic (2020, 2022) dengan menyoroti peran sentral bahasa sebagai dimensi kunci eksklusi dalam konteks Indonesia, area yang belum terelaborasi sepenuhnya dalam kerangka teori tersebut. Analisis mengungkapkan bahwa di samping kesulitan berbahasa Indonesia formal dan vernakular, mereka menghadapi prasangka rasial diskriminatif. Diskriminasi ini berakar pada proses jwanisasi historis yang diterapkan pemerintahan Sukarno dan Soeharto, yang memicu hierarkisasi bahasa, rasisme struktural, dan diskriminasi rasial. Penelitian ini berargumen bahwa bahasa, ideologi, dan kekuasaan saling berkelindan, melanggengkan siklus eksklusi terhadap kelompok marginal ini. Menggunakan metode penelitian kajian literatur dan wawancara semi-terstruktur, penelitian menemukan perlunya intervensi multidimensi yang menargetkan hierarki bahasa, prasangka rasial, dan rasisme struktural untuk memutus siklus eksklusi dan mendorong inklusi.

**Kata Kunci:** Bahasa; Eksklusi Sosial; Ideologi; Indonesia Timur; Jwanisasi

### Pendahuluan

Pulau Jawa menjadi salah satu tujuan utama anak-anak muda asal Indonesia Timur untuk menempuh pendidikan tinggi. Kehadiran mereka di banyak universitas di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang dan Semarang adalah pemandangan umum. Sayangnya, beberapa penelitian menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam beradaptasi sehingga kesulitan dalam meraih pendidikan yang optimal (Musthofiyah & Isnainiyah, 2020; Wijaya & Rizal, 2023). Kesulitan-kesulitan yang ada bahkan membuat

mereka menarik diri dari pergaulan dengan mahasiswa-mahasiswa asal Pulau Jawa. Pendidikan adalah hak asasi manusia, dan eksklusi terhadap kelompok marginal di bidang ini menghasilkan dampak yang panjang, sehingga menuntut perhatian bersifat sistemis.

Eksklusi sosial, sebagaimana didefinisikan oleh Pierson (Seda et al., 2018), adalah proses berkepanjangan yang menghalangi individu, keluarga, kelompok, dan komunitas untuk mengakses sumber daya esensial yang diperlukan demi partisipasi aktif dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Bracic (2022) lebih lanjut menyempurnakan konsep ini, menganjurkan penyelidikan eksklusi sosial berdasarkan derajatnya, bukan sebagai keadaan absolut. Seseorang mungkin tereksklusi hanya di satu dimensi (misalnya pendidikan), sementara yang lain menghadapi eksklusi di berbagai dimensi sekaligus (misalnya pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal). Bracic (2020) memandang eksklusi sosial sebagai proses dan interaksi di mana suatu kelompok secara bertahap atau cepat tersingkir ke pinggir, sering kali diabadikan oleh siklus yang terdiri dari budaya antiminoritas, diskriminasi, strategi bertahan, dan kesalahan atribusi.

Penelitian ini menyoroti bagaimana partisipasi pendidikan tinggi belum sepenuhnya memberdayakan individu, khususnya kelompok marginal, karena adanya hambatan budaya yang signifikan seperti hambatan bahasa. Hambatan bahasa ini dalam konteks masyarakat Indonesia adalah buah dari rasisme struktural. Sebagai contoh, rasisme struktural diidentifikasi sebagai akar penyebab diskriminasi terhadap orang-orang Papua (Daniels, 2024; Webb-Gannon, 2023). Diskriminasi, yang sering berasal dari stigma, secara sistematis mengeksklusi mereka yang terstigmatisasi (Liamputtong & Rice, 2022). Secara historis, bahasa telah lama diakui sebagai faktor utama yang berkontribusi pada kegagalan pendidikan anak-anak kelompok minoritas (Garcia-Sanchez, 2011; Romaine, 2000). Artikel ini memperluas fokus sehingga mencakup kelompok Indonesia Timur lainnya; menelusuri bagaimana identitas marginal dan bahasa berkontribusi pada diskriminasi yang mereka hadapi dalam pendidikan, yang—disadari atau tidak—telah mengeksklusi mereka dari partisipasi optimal.

Definisi 'wilayah Indonesia Timur' bervariasi; misalnya, situsweb Indonesiatimur.co mencakup 15 provinsi (*Definisi – Indonesia Timur*, n.d.), namun kategorisasi ini berbeda dengan definisi umum yang seringkali menyertakan Nusa Tenggara Barat dan Bali. Perbedaan ini menggarisbawahi bahwa identifikasi kelompok yang dilakukan negara tidak selalu sejalan dengan persepsi masyarakat. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai entitas berkuasa yang melanggengkan dominasi atas kelompok marginal. Analisis ini mengungkap bahwa hambatan bahasa adalah implikasi dari benturan ideologi dan diskriminasi rasial; dua elemen mendasar yang sering terabaikan ketika menelaah permasalahan eksklusi sosial yang dialami orang-orang Indonesia Timur.

## Metode

Penelitian ini menggunakan kajian literatur dan wawancara semi terstruktur bersama dua informan. Kajian literatur yang digunakan penulis adalah jenis studi literatur nonsistematis, yang dilakukan untuk mempelajari riset-riset mengenai mahasiswa perantau asal Indonesia Timur di Yogyakarta, Semarang, serta Malang. Kajian literatur nonsistematis merajut literatur-literatur relevan berdasarkan evaluasi-evaluasi kritis peneliti melalui penemuan dan kritik Metode ini dibentuk oleh eksposur, keahlian, dan pengalaman peneliti (Kraus et al., 2022). Karena penelitian ini menyentuh persoalan sensitif, penulis juga melakukan wawancara semi terstruktur untuk menggali pengalaman mahasiswa Indonesia Timur yang menempuh pendidikan tinggi di Jakarta. Sensitivitas isu membuat peneliti menyadari bahwa penelitian lanjutan perlu melibatkan perwakilan dari mahasiswa Indonesia Timur sehingga dapat mendapatkan informasi yang lebih

representatif. Informan pertama, R (laki-laki, 32 tahun), adalah sarjana administrasi negara dari perguruan tinggi swasta di Jakarta yang berasal dari Ternate, Maluku Utara. Ia kini berkarier di bidang komunikasi pemasaran di perusahaan tambang. Informan kedua, I (laki-laki, 26 tahun), adalah mahasiswa pascasarjana perguruan tinggi swasta di Jakarta yang berasal dari Bacan, Maluku Utara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengacu pada empat siklus eksklusi (Bracic, 2020) yang mereka alami selama menempuh pendidikan di Jakarta; yaitu budaya antiminoritas, diskriminasi, dan strategi bertahan. Konsep kesalahan atribusi tidak ditanyakan karena dilakukan oleh kelompok mayoritas.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kajian Literatur

Setidaknya terdapat dua penelitian yang mempelajari bagaimana bahasa menjadi penghambat bagi orang-orang Indonesia Timur saat menempuh pendidikan tinggi. Wijaya & Rizal (2023), mengungkap bagaimana orang-orang Indonesia Timur tidak cuma kesulitan dalam berbahasa Indonesia formal, tetapi juga bahasa vernakular terutama bahasa Jawa dan Jakarta. Hambatan bahasa terwujud di tiga aspek linguistik yakni fonologi, morfologi, dan semantik. Kesulitan ini membuat orang Indonesia Timur merasa tak nyaman saat berada di lokasi sosial yang didominasi penutur asal Indonesia Barat. Temuan ini sesuai dengan pengalaman informan R saat kuliah. Di satu perkuliahan, karena malu mengutarakan pertanyaan kepada dosen, R sampai menitip pertanyaan kepada temannya yang berasal dari Jakarta. Ia mengaku merasa terpukul saat dosen memuji pertanyaan yang ia titipkan kepada rekannya tadi. Sementara itu, I menyatakan kesulitannya berkomunikasi berkat intonasi suaranya yang lantang. Dalam menyampaikan pendapat ia kerap dianggap ingin mendebat dosen atau mahasiswa, sehingga membuatnya membatasi diri.

Studi Wijaya & Rizal yang memijak teori rasisme linguistik menyimpulkan adanya korelasi kuat antara bahasa dengan diskriminasi sosial yang dialami mahasiswa asal Indonesia Timur. Selain itu, karena bahasa Indonesia formal diterapkan di institusi pendidikan, responden penelitian menganggap bahasa Indonesia yang mereka ucapkan sebagai tidak standar. Hal ini membuat para responden menarik diri dari komunitas penutur yang didominasi orang Jawa. Pengalaman R dan I memang tidak dapat digeneralisasi, tetapi penelitian-penelitian yang akan dijabarkan di bawah menunjukkan bagaimana bahasa dan diskriminasi menjadi penghambat bagi mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia Timur.

Musthofiyah & Isnainiyah (2020) turut meneliti mahasiswa perantau asal Indonesia Timur di kota Malang. Berpijak pada studi-studi terdahulu, diketahui bahwa para perantau asal Indonesia Timur menampilkan prestasi akademik yang rendah seperti rendahnya IPK, putus sekolah atau *drop out*, dan tindakan indisipliner. Mereka menemukan lima hambatan akademik mahasiswa Indonesia Timur saat kuliah di kota tersebut, yakni rasa memiliki/keterikatan yang lemah, kesadaran akan stigma yang melekat, isolasi sosial dari masyarakat, keterbatasan persiapan kuliah, dan hambatan bahasa (Ibid: 20-27). Seorang narasumber penelitian mereka mengatakan bahwa hambatan bahasa bukanlah sesuatu yang tidak ia coba atasi. Namun, rasa rendah diri acap muncul karena dialek kentalnya membuatnya ditertawai oleh teman-teman sekelas. Apalagi dosen-dosen yang mengajar juga sering mencampur bahasa Indonesia dengan Jawa, yang semakin menyulitkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia Timur dalam memahami pelajaran.

Selain dua studi di atas, peneliti mengklasifikasi penelitian-penelitian yang ada, sebelum mengaitkannya dengan eksklusi sosial berbasis bahasa yang dialami mahasiswa perantau asal Indonesia Timur di Pulau Jawa.

Judul	Penulis	Temuan
“Pembelajaran bahasa indonesia berwawasan literasi baru di perguruan tinggi dalam menjawab tantangan era revolusi industri 4.0”	Ibda (2019)	Keempat penelitian ini mengabaikan proses eksklusi yang terjadi berkat pemaksaan penggunaan satu bahasa, serta diskriminasi rasial yang dialami orang-orang Indonesia Timur karena penampilan fisik mereka yang berbeda dengan kelompok dan kebudayaan dominan di Indonesia. Mereka juga menafikan kenyataan bahwa bahasa-bahasa daerah adalah lingua franca di banyak tempat di negara ini. Walau bahasa Indonesia digunakan di ruang-ruang formal, yang dituturkan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari adalah bahasa daerah (vernakular) atau bahasa lokal (Farisiyah & Zamzani, 2018).
“Peranan bahasa indonesia dalam membangun karakter generasi muda bangsa”	Murdiyati (2020)	
“Penguatan Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional Melalui Poster Interaktif pada Instagram@ BASTRA. ID”	Nurrahmah (2023)	
“Pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di perguruan tinggi”	Purnamasari & Hartono (2023)	Penelitian-penelitian psikologi yang bertema penyesuaian diri, efikasi diri akademik dan penyesuaian diri akademik, serta kecerdasan emosional mewarnai analisis tentang kesukaran yang dihadapi mahasiswa rantau asal Indonesia Timur di Semarang. Mereka mengabaikan fakta bahwa fenomena tersebut merupakan buah dari persoalan struktural yang sekian lama tidak teratasi.
“Pengalaman penyesuaian sosial mahasiswa etnis papua di kota Semarang”	Barimbing & La Kahija (2015)	
“Hubungan antara efikasi diri akademik dengan penyesuaian diri akademik pada mahasiswa rantau dari Indonesia Bagian Timur di Semarang”	Fitri & Kustanti (2020)	
“Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan Penyesuaian Sosial Mahasiswa Rantau Dari Indonesia Timur”	Manafe & Kristianingsih (2023)	

“Analisis semiotika tentang penggambaran orang pedalaman pada film Indonesia.”	Rosalia et al. (2019)	Kelima penelitian ini menggambarkan proses stereotipisasi terhadap masyarakat Indonesia Timur yang terpampang di produk-produk budaya populer (film, program TV, film dokumenter, dan musik). Stereotip-stereotip itu lalu melekat pada identitas orang-orang Indonesia Timur dan menjadi kenyataan sehari-hari mereka. Beberapa penelitian di samping juga menyoroti bagaimana musik dijadikan alat untuk melawan stereotip dan ketidakadilan.
<i>Representation of Eastern Indonesian Stereotype on Television Program (Semiotic Analysis of Charles Sanders Peirce in Waktu Indonesia Timur Television Program)</i>	Dwiliarossa (2019)	
<i>Stigmatisasi Terhadap Orang Timur Pada Film Dokumenter Dinasti Penagih Utang Dari Timur: The Debtfathers Karya Vice Indonesia</i>	Perdana (2022)	
“Anana Bicara-Bicara: Selera Musik, Gaya Hidup, dan Strategi Rapper di Kota Jayapura.”	Anas et al. (2020)	
“Tafsiran Kognisi Puitis terhadap Lagu Black Brothers dalam Mengungkap Transkrip Tersembunyi (Hidden Transcript)”	Awom (2017)	

Di dunia nyata, stereotipisasi tersebut menjelma stigmatisasi, sehingga mempengaruhi kesejahteraan—bahkan keamanan—mahasiswa rantau asal Indonesia Timur. Di Yogyakarta, selain dianggap sebagai pembawa masalah yang “belum dapat dipecahkan” (Adellia & Aco, 2020), kehadiran perantau dari Indonesia Timur juga dihadapi dengan kekerasan oleh organisasi kemasyarakatan pelestari tradisi Jawa (Basrianto, 2017).

Berdasarkan analisis atas penelitian-penelitian di atas, penulis berargumentasi bahwa bahasa berkaitan erat dengan ideologi negara. Ideologi menjustifikasi kekuasaan dan ideologi yang kuat akan memperkokoh kekuasaan yang telah lama dominan. Eagleton (1991) memandang ideologi sebagai arena diskursif, yang menjadi tempat bagi kekuatan-kekuatan sosial untuk bertarung dan berpadu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berpusat pada reproduksi kekuatan sosial secara menyeluruh. Ideologi adalah fenomena semiotis yang penekanannya ada pada entitas materialnya, yaitu tanda (*signs*), dan pada pokoknya berurusan dengan makna (*meanings*). Terinspirasi dari Valentin Voloshinov dan Michel Pecheux, Eagleton berpendapat bahwa studi diskursus memberi dimensi baru atas teori mengenai ideologi, yang mengkaji performa linguistik ketimbang perihal ‘kesadaran’, serta interaksi sosial alih-alih ‘gagasan-gagasan.’ Praktik diskursif, yang meliputi produksi simbol-simbol, mengalami proses yang disebut Bourdieu (1991) sebagai “unifikasi linguistik”—yang diterapkan negara seiring transformasi kebangsaan suatu kawasan menjadi negara-bangsa—yang mengupayakan suatu bentuk bahasa resmi. Peresmian bahasa tersebut meminggirkan bahasa-bahasa lokal dan memaksa masyarakat di negara-bangsa “baru” untuk memiliki kompetensi linguistik yang memadai. Penyingkiran bahasa-bahasa lokal tidak dapat hanya dipandang bertujuan praktis; terdapat konflik antar kepentingan-kepentingan yang bertujuan untuk merebutkan

kekuasaan simbolis. Bahasa absah (*legitimate language*) adalah instrumen bagi ideologi untuk menerapkan monopoli politiknya. Paragraf-paragraf selanjutnya akan menjelaskan bagaimana bahasa beroperasi sebagai instrumen ideologisasi negara (Indonesia sebagai institusi politik) terhadap bangsa (masyarakat multietnis dalam satu wilayah geografis bernama Indonesia).

Proses jawnisasi yang diterapkan pemerintahan Soeharto tidak cuma melanggengkan kekuasaannya tapi juga menguntungkan etnis Jawa di bidang politik (Fogg, 2015; Mulder, 2013; Thornton, 1972). Jawnisasi tidak hanya beroperasi di aspek fisik (transmigrasi penduduk atau pangan, misalnya) tetapi juga, dan mungkin yang paling utama, di aspek bahasa. Jawnisasi sebagai internalisasi sekaligus sosialisasi ideologi bangsa tidak dimulai oleh Soeharto. Anderson (1990) menunjukkan bagaimana budaya politik Jawa Sukarno tak hanya tercermin dari pidato-pidatonya, tapi juga dari obsesinya terhadap ritual-ritual dan benda-benda pusaka Jawa. Walau begitu, di era Orde Barulah jawnisasi digencarkan secara sistematis; terutama pada 1978 melalui Instruksi Presiden No. 10 tentang Penataran Pancasila, dan pada 1985 lewat kebijakan “Asas Tunggal Pancasila” (Mulder, 2013: 150). Berakhirnya rezim Orde Baru tidak serta-merta menghilangkan kontur politisnya—dalam bentuk pendekatan dan kebijakan rasial negara—karena hal ini telah tertanam di alam bawah sadar masyarakat kita. Jatuhnya Orde Baru tidak mengubah isu-isu strategis terkait bahasa minoritas atau politik bahasa di Indonesia. Sebab wawasan mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan masih dominan sebagai bagian dari filter kognitif para pengambil keputusan dan kebijakan di tingkat nasional (Arka, 2013: 100).

Dalam kajian yang membahas mistisisme Jawa dan politik tanah air—yang terbit pertama kali pada tahun 1998, Mulder (2013) menunjukkan bahwa ideologi Pancasila kental dipengaruhi kejawen yang menitikberatkan individu dan alam pada kesatuan dan harmoni, serta hierarki sosial. Hierarki tersebut tercermin terutama pada stratifikasi *ngoko* dan *kromo* dalam bahasa Jawa. Ketertiban diidealisasi sehingga ideologi Pancasila ala Soeharto, pada praktiknya, menjauh dari prinsip egalitarianisme ala Demokrasi Liberal. Ketertiban juga menegasikan ekspresi politik terbuka sehingga tidak mengherankan jika pemerintah membonsai ideologi-ideologi politik dan mengerucutkan partai-partai menjadi tiga. Prinsip ‘*nrimo*’ Jawa dibayangkan sebagai kepasrahan kepada tatanan alam sehingga menjadi tugas moral setiap orang. Masyarakat Indonesia harus “*menerima hidup sebagaimana adanya, sambil mengasah keadaan kedamaian batin dan ketenangan emosional*” (Mulder, 2013: 131). Proses jawnisasi dilakukan secara sistematis dan menyeluruh; pendidikan moral pancasila tidak diajarkan sebatas di bangku-bangku sekolah, tetapi juga di lingkup-lingkup profesi. Indoktrinasi sistematis ini dinilai Mulder berhasil karena telah menumpulkan pikiran, menanamkan pola pemikiran gaya militer, membagi kehidupan ke sektor moralistik dan sektor yang praktis, serta mewaspadai kebebasan berbicara; dan menunjukkan bahwa sekolah sebagai alat yang paling dahsyat dalam proses indoktrinasi tersebut. Cara indoktrinasi tersebut disampaikan relatif mirip dengan kejawen atau pemikiran kebatinan Jawa. Dalam kejawen, mereka yang tidak patuh pada tatanan dianggap ‘*durung Jawa*’. Sistem moral dari pancasilaisasi Orde Baru menganggap orang-orang yang memberontak dari tatanan sebagai ‘belum Indonesia’. Penegakan ketertiban perlu dilakukan ke dalam (internal) dan ke luar, dan dalam pelaksanaannya memerlukan kekuasaan yang dapat dilakukan secara ‘*alus*’ dan kasar. Untuk menjaga ketertiban, kekerasan yang dilakukan negara terhadap masyarakat di Dili, Lampung, serta Tanjung Priok dianggap sebagai kewajiban (Mulder, 2013: 251-253).

“Bahasa politik” Indonesia modern mewarisi tiga bahasa dan dua budaya yang berbeda (Anderson, 1990). Tiga bahasa tersebut adalah Belanda, Jawa, dan “Melayu revolusioner” sementara dua tradisi yang dimaksud adalah Barat-Belanda dan Jawa. Pada

awalnya, terutama di masa penjajahan Jepang, bahasa Melayu pasar lebih populer digunakan karena bernuansa lebih demokratis, tidak terikat dengan kelompok etnolinguistik dominan, juga dianggap dapat mewujudkan persatuan nasional dan cita-cita ke depan. Akan tetapi, krisis mendalam, yang bermula paling tidak sejak 1956, memudahkan degup revolusioner di kalangan elite politik pascarevolusi. Secara sosiologis, hal tersebut tercermin dari semakin berkembangnya stratifikasi sosial di masyarakat, semakin terisolasinya kaum elite dari massa, serta perkembangan struktur birokratis yang beroperasi layaknya lintah di setiap arena sosial. Hal-hal tersebut juga didorong oleh kemerosotan di lanskap politik dan ekonomi, sehingga proses jwanisasi bahasa politik Indonesia semakin tidak terelakkan, khususnya di segi kosakata dan modalitas atau caranya dituturkan. Jwanisasi bahasa politik Indonesia ini meliputi: (1) kramanisasi bahasa publik Indonesia, (2) terbentuknya ‘ngoko’ baru, (3) netralisasi atau terperangkapnya simbol-simbol revolusioner, dan (4) citra-citra politik Jawa (Anderson, 1990: 145-148). Kramanisasi membuat kosakata-kosakata tinggi—yang masuk dalam kategori *krama*—turut berada di posisi tinggi dalam bahasa Indonesia. Alhasil, bahasa Melayu pasar dan Betawi tersingkir lalu bertransformasi menjadi ‘ngoko’ atau kosakata rendah baru. Kramanisasi tersebut juga mendelegitimasi kosakata-kosakata revolusioner seperti “revolusi”, “sosialisme”, serta “sama rata sama rasa”.

Mulder dan Anderson tidak menyinggung bagaimana dampak jwanisasi pada eksklusi sosial terhadap masyarakat Indonesia Timur. Anderson bahkan berargumen bahwa jwanisasi tersebut bukan suatu imperialisme budaya, melainkan kejatuhan bahasa Indonesia sebagai cara berpikir. Tetapi, politik bahasa tercatat telah menyingkirkan kelompok-kelompok marginal seperti Cina-Indonesia (Rahman, 2011; Salmon, 1983). Fogg (2015) mengungkap bagaimana politik standardisasi bahasa telah menyingkirkan kelompok Islam dalam percaturan politik nasional. Pasca pengakuan kedaulatan di tahun 1950, pada 1952 pemerintah membentuk Lembaga Bahasa dan Budaya Universitas Indonesia yang ditugaskan untuk mengembangkan bahasa Indonesia, yang dipimpin oleh orang Jawa bernama Prof. Dr. Prijono. Dalam dua tahun pertama, mereka berhasil menciptakan 60.000 kosakata baru bahasa Indonesia. Walaupun berkomitmen untuk menyerap dari bahasa-bahasa daerah dan asing lain, lembaga ini dikritik karena terlalu memprioritaskan mengadopsi kosakata bahasa Jawa, Sanskerta, dan Belanda (Fogg, 2015: 99-100). Reformasi linguistik yang digalakkan pemerintah pada dekade 1940 hingga 1950an telah berdampak pada perpindahan kekuasaan yang nyata: Dalam konteks ini mendongkel pemimpin Islam tradisional dari posisi kekuasaan dan melindungi jabatan orang-orang birokratis yang umumnya berorientasi Barat.

Tidak seperti Kanada atau Swiss, Indonesia hanya memiliki satu bahasa resmi. Padahal, dengan kekayaan 550 bahasa daerah, Indonesia menjadi negara kedua dengan bahasa terbanyak setelah Papua New Guinea (Evans dalam Arka, 2013: 76). Bahasa Indonesia yang ditetapkan sebagai bahasa persatuan adalah produk unifikasi linguistik *par excellence*. Bahasa menjadi ideologis karena menampakkan kepentingan-kepentingan spesifik, yang diselimuti, dirasionalisasi, dinaturalisasi, diuniversalisasi, dan dilegitimasi demi kekuatan-kekuatan politik tertentu (Eagleton, 1991: 202). Bahasa Indonesia adalah hasil kerja manajemen bahasa yang secara politis berakar mendalam di semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan tersebut berasal dari bahasa sanskerta yang dekat secara linguistik dan kultural dengan bahasa Jawa. Kebhinnekaan atau keberagaman menjadi identitas nasional yang dijamin oleh konsitusi dan dianggap layak untuk dirayakan. Namun, pengutamaan bahasa Indonesia baku tentu mengancam bahasa-bahasa lokal atau daerah. Arka (2013: 80) mengidentifikasi peran samar faktor-faktor nonlinguistik—utamanya ekonomi dan politik—yang turut mempengaruhi kesejahteraan penutur bahasa-bahasa minoritas.

Berdasarkan pembacaan kritis atas literatur-literatur terpilih, ditemukan dua persoalan pokok yang belum disajikan para peneliti. Pertama, rasisme struktural sebagai pokok persoalan yang timbul berkat kombinasi faktor-faktor terkait seperti politik, ekonomi, dan budaya. Kedua, indoktrinasi ideologi negara yang isi dan konteksnya lebih menguntungkan suku terbesar di Indonesia, Jawa. Ideologi tersebut menancap dengan subtil dan disokong sepenuh tenaga oleh para aparatur negara.

## 2. Persoalan Rasial Sebagai Subjek Amatan Eksklusi Sosial

Pulau Jawa menerima kedatangan banyak mahasiswa rantau asal Indonesia Timur. Ketimpangan kualitas pendidikan (Dahrul et al. dalam Manafe & Kristianingsih, 2023) menjadi alasan mengapa universitas-universitas di Pulau Jawa mereka jadikan destinasi untuk menempuh pendidikan tinggi. Bahkan hingga kini pemerintah masih belum mampu mengatasi ketimpangan pendidikan yang terjadi di Indonesia bagian timur. Jumlah buta huruf terbesar di Indonesia ada pada kawasan timur Indonesia, yaitu provinsi Papua (36,31%), Nusa Tenggara Barat (16,48%), dan Sulawesi Barat (10,33%). Sementara provinsi di Indonesia Timur lain juga memiliki persentase buta huruf di atas 5%, yaitu Nusa Tenggara Timur (10,13%), Gorontalo (5,05%), Sulawesi Tenggara (6,76%) dan Papua Barat (7,35%) (Fitri & Kustanti, 2020). Ketimpangan pendidikan di Indonesia Timur pun terlihat mencolok dari segi lama durasi sekolah; di Papua, rata-rata lama sekolah ada di kisaran tujuh tahun sementara durasi rata-rata nasional berada di angka sembilan tahun (Purwanti, 2023).

Delapan dekade sejak Indonesia merdeka, ketimpangan ini masih terus lestari. Ketimpangan yang ada juga disokong oleh diskriminasi rasial yang dialami orang-orang Indonesia Timur. Menggunakan paradigma teori ras kritis, Daniels (2024) berpendapat bahwa perendahan yang dialami masyarakat kulit hitam (*Black people*) Papua oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia sebagai ‘*compound racial subordination*’. Elite-elite Indonesia setelah era penjajahan telah membangun suatu bentuk nasionalisme yang berkisar pada manusia pribumi Indonesia berkulit terang sembari memarginalisasi kelompok-kelompok berkulit gelap sebagai warga rendahan. Hal ini diperparah dengan perbedaan agama yang dipeluk warga Papua sehingga membuat mereka dikategorisasi sebagai “kafir Hitam” (Daniels, 2024: 3). Perlakuan diskriminatif ini adalah perpanjangan tangan sistem global supremasi kulit putih. Para narasumber Daniels—mahasiswa-mahasiswa Papua di Yogyakarta—mengungkapkan bagaimana mereka dan teman-teman sering mendapat perlakuan rasis dan diskriminatif dari penduduk lokal. Fakta lain yang tersingkap adalah bagaimana orang kulit Hitam lain di Indonesia yang berasal dari Maluku atau Nusa Tenggara memandang diri mereka lebih baik ketimbang orang Papua; yang disebabkan oleh pendidikan bernuansa rasis dari orang Indonesia berkulit terang (Daniels, 2024: 9). Temuan ini beresonansi dengan derajat eksklusi yang diutarakan Bracic; identitas Orang Timur tidak tunggal dan demikian pula eksklusi sosial yang mereka alami.

Bahasa tidak bisa dilepaskan dari etnisitas. Dalam studinya mengenai etnis dan eksklusi sosial, Bracic (2022) menyarankan agar eksklusi sosial dipandang sebagai sesuatu yang tidak berdampak secara absolut pada kelompok paling termarginalkan, melainkan hierarkis. Sekelompok orang dapat lebih tereksklusi dibanding kelompok yang lain. Kelompok C mungkin saja mengalami eksklusi di banyak dimensi ketimbang kelompok A. Di bidang pendidikan, Wigglesworth-Baker (dalam Bracic, 2022: 1047) menunjukkan bagaimana reformasi bahasa di Georgia—yang mengatur etnis minoritas untuk belajar bahasa Georgia—telah melahirkan hierarki bahasa yang disertai dengan ideologi eksklusi.

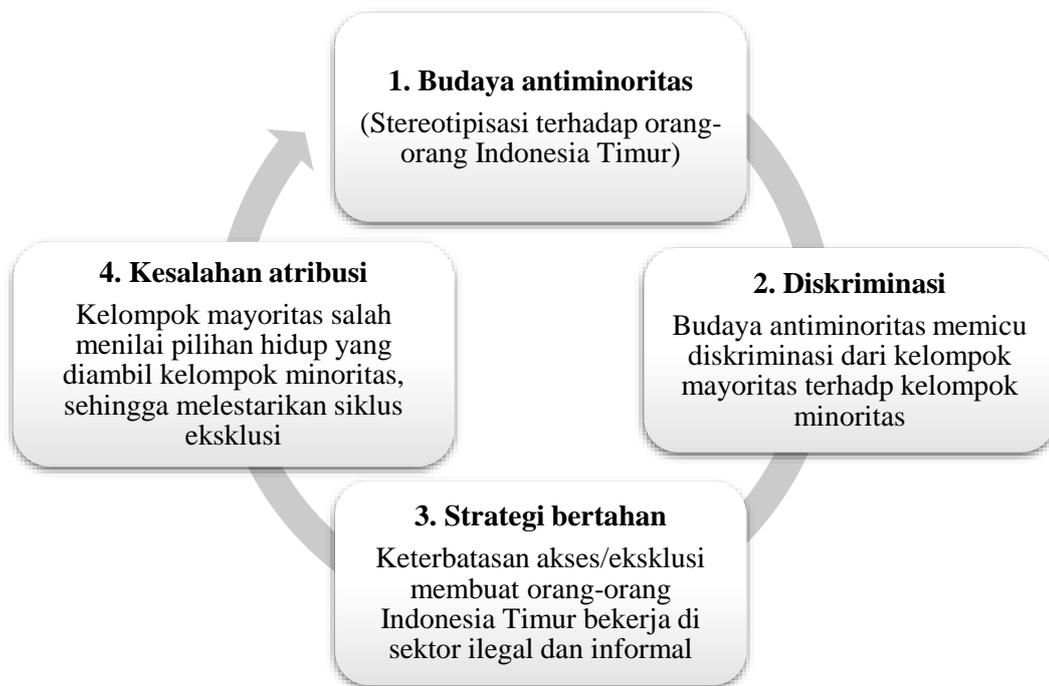
Eksklusi sosial, yang merupakan suatu proses berkelanjutan, akan berdampak pada individu atau kelompok di beberapa fase dalam hidup. Orang Papua dan Ambon mungkin sama-sama tereksklusi di bidang pendidikan. Tetapi bisa saja orang Ambon lebih beruntung saat mengakses hak atas rumah (*rights to housing*). Eksklusi sosial, senada dengan pendapat Byrne (2005), melihat ketidaksejahteraan secara multidimensi.

Rasisme struktural ini membuat mahasiswa asal Indonesia Timur kesulitan dalam mengakses tempat tinggal layak. Banyak pengelola rumah kos di Yogyakarta dan Malang menolak menyewakan propertinya kepada mereka. Penolakan ini bahkan turut dirasakan mahasiswa perempuan (Musthofiyah & Isnainiyah, 2020). Meskipun para peneliti dan informan menyadari bahwa penolakan tersebut berasal dari stereotip yang melekat pada orang-orang Indonesia Timur, mereka tidak mengemukakan rasisme sebagai persoalan. Sementara itu, Wijaya & Rizal (2023) menyebut rasisme linguistik sebagai gejala mencolok dalam studi mereka terhadap mahasiswa-mahasiswa Indonesia Timur yang berkuliah di Malang.

Sebagai penutur bahasa minoritas, mereka mengalami rasisme dan diskriminasi dari kelompok dominan (orang-orang Jawa dan Jakarta). Diskriminasi tersebut menghadirkan permasalahan dalam wujud miskominasi dan intimidasi. Bentuk-bentuk intimidasi yang mereka alami adalah menjadi subjek tertawaan, dihindari, serta diremehkan. Untuk mengatasi persoalan itu, 11 dari 41 partisipan mempelajari bahasa lokal, khususnya bahasa Jawa dan Jakarta sehingga menggunakan dialek-dialek tertentu yang menjadi variasi standar bahasa Indonesia.

Dalam kaitannya dengan perbedaan etnis, Bracic (2020: 14-22) menunjukkan bahwa eksklusi sosial senantiasa lestari karena adanya siklus eksklusi yang repetitif, yang jika tidak ditangani secara sistemis hanya akan melanjutkan siklus tersebut. Siklus eksklusi terjadi dalam empat fase, yakni: (1) Budaya antiminoritas (yang dilakukan kelompok mayoritas), (2) diskriminasi (yang dilakukan kelompok mayoritas), (3) strategi bertahan (yang dilakukan kelompok minoritas), dan (4) kesalahan atribusi (yang dilakukan kelompok mayoritas).

Siklus eksklusi tersebut dapat diilustrasikan seperti ini: Kelompok minoritas Indonesia Timur, karena budaya antiminoritas yang ada, mengalami diskriminasi di bidang pendidikan, yang berlanjut saat mereka mencari pekerjaan. Karena tidak dapat bekerja di bidang-bidang formal, mereka mengatasinya dengan bekerja di bidang-bidang alternatif (strategi bertahan). Namun karena pekerjaan yang mereka geluti berada di luar norma masyarakat (contohnya bekerja sebagai penagih utang atau pekerjaan-pekerjaan di sektor informal atau ilegal), kelompok mayoritas kerap keliru dan memandang negatif pekerjaan tersebut (kesalahan atribusi). Kekeliruan tersebut pun kembali menjadi budaya antiminoritas dan membuat siklus eksklusi kembali berputar. Dengan demikian, realitas yang terjadi di Indonesia memperkuat kerangka siklus eksklusi sosial Bracic. Bedanya, masyarakat Romani dalam studi Bracic adalah entitas tunggal sementara Indonesia Timur dalam penelitian ini bervariasi.



Gambar 1. Ilustrasi Siklus Eksklusi Sosial (Bracic, 2020)

### 3. Jawanisasi Sebagai Sarana Ideologisasi

Di bagian ini penulis akan menunjukkan bagaimana bahasa juga berkaitan erat dengan ideologi para penutur bahasa di suatu negara. Faktor ini juga yang menjadi keterbatasan banyak penelitian yang telah dikupas sebelumnya. Informan R yang merantau ke Jakarta untuk menimba ilmu tak menyangka bahwa bahasa dapat menjadi kendala berarti baginya untuk menggapai cita-cita. Perasaan terkucilkan semakin menebal manakala ia menyadari dirinya merupakan satu-satunya mahasiswa asal Indonesia Timur di angkatannya. Setelah tertatih dalam mengikuti perkuliahan di semester pertama, ia pun memberanikan diri untuk melebur bersama orang-orang non-Indonesia Timur. Ia menyadari itu merupakan satu-satunya jalan baginya untuk menyelesaikan pendidikan. Namun di kampusnya, penulis mengetahui ada jurusan-jurusan yang banyak diminati oleh mahasiswa rantau Indonesia Timur, yaitu ilmu politik dan hukum. Ketika penulis suguhkan skenario alternatif, mengandaikan dirinya berkuliah di salah satu dari dua jurusan tersebut, R mengakui bahwa proses asimilasi bisa berjalan lambat karena ia akan bergaul dengan mahasiswa Indonesia Timur saja.

Skenario tersebut saya minta R bayangkan karena informan kedua, I, menempuh pendidikan sarjana di jurusan ilmu politik pada kampus yang sama. Berdasar pengamatan, proses adaptasi yang ia lalui terbilang singkat dan ia dapat bergaul dengan banyak mahasiswa non-Indonesia Timur. I mengakui bahwa kefasihannya berbahasa Indonesia dan keluwesannya dalam bergaul disokong oleh pengalamannya menempuh pendidikan pesantren di Makassar yang komposisi muridnya lebih beragam ketimbang sekolah-sekolah di kampung asalnya, Bacan. Hal ini ia ungkapkan sembari memberi contoh banyaknya mahasiswa rantau asal Indonesia Timur di angkatannya yang kesulitan bersosialisasi dengan mahasiswa non-Indonesia Timur. Sama seperti R, I menilai kemampuan berbahasa Indonesia secara formal dan vernakular (khususnya bahasa “gaul” Jakarta) sebagai modal penting di hampir segala situasi.

Kedua kesaksian di atas semakin menebalkan konsep hierarki bahasa yang diajukan Bracic. Selain itu, Arka (2013: 80) menemukan bahwa penguasaan bahasa

dominan dianggap sebagai kesempatan strategis untuk menggapai keunggulan sosioekonomi di masa Indonesia modern. Bahkan strategi tersebut dianggap sebagai pilihan praktis dan pragmatis sekaligus diterima sebagai satu-satunya jalan yang memadai. Mengacu tipologi modal Bourdieu, tanpa modal uang dan modal budaya yang memadai, perantau asal Indonesia Timur kemungkinan besar akan disulitkan oleh hambatan bahasa ini, sehingga membuat mereka hanya bergaul dengan sesamanya saja. Kompetensi linguistik menjadi aspirasi para penutur dari kelompok minoritas atau terdominasi untuk menaikkan nilai mereka di pasar linguistik; mereka bahkan menerapkan penggunaan bahasa resmi sejak di dalam rumah (Bourdieu, 1991: 49) Pada akhirnya, selain ketidakmampuan mencapai prestasi akademis, aneka kesempatan yang tersedia di kampus dalam berbagai bentuk pun enggan mereka geluti. Menurut I, hal ini tampak pada pola bergaul perantau Indonesia Timur di kampusnya di mana mereka lebih senang berorganisasi di organisasi agama (utamanya Protestan) dan organisasi aktivisme yang terkenal memiliki basis anggota mahasiswa asal Indonesia Timur, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). I juga menyadari sedikitnya sesama mahasiswa rantau asal Indonesia Timur yang memperoleh beasiswa atau berkiprah secara aktif di himpunan program studi—kecuali program studi ilmu politik dan hukum di mana terdapat banyak mahasiswa Indonesia Timur di dalamnya.

Di atas telah dikemukakan jawnisasi bahasa yang dilakukan oleh Lembaga Bahasa dan Budaya Universitas Indonesia pada dekade 1950an. Selain di aspek tersebut, jawnisasi juga merambah ke budaya politik sehingga unsur-unsur kejawaan menjadi wacana negara di masa Orde Baru. Oposisi atau kritik—melalui berbicara secara terbuka—dipandang sebagai tindakan memalukan yang tidak sesuai dengan budaya Jawa. Hal tersebut tentu menjadi kontradiksi bagi Muslim “modernis” dan mahasiswa-mahasiswa muda yang utamanya bukan bersuku Jawa. Wajar kiranya jika Muslim “modernis” tersingkir dari sistem politik; serta bagaimana Angkatan ’66 tidak menemukan posisi nyaman dalam tatanan Orde Baru. Hal semacam itu kembali berlangsung dua dekade setelahnya. Ketika Ali Murtopo mengecam protes-protes yang ditujukan kepada rezim pada dekade 1970an sebagai hal yang tidak sesuai dengan perjuangan Orde Baru, yang sebenarnya ia maksud adalah aksi-aksi tersebut tidak selaras dengan etika sosial Jawa (Thornton, 1972: 115-116). Perkara etika ini senada dengan paparan Anderson (1990: 145) mengenai pengaruh jawnisasi dalam tatanan sosial dan politik Indonesia. Analisis Anderson patut kita cermati karena terbit pada tahun 1966 saat kekuasaan masih di tangan Sukarno. Artinya, jawnisasi merentang jauh sebelum masa Orde Baru dan telah mengeksklusi kelompok-kelompok non-Jawa di percaturan politik. Di titik ini, ungkapan “Jawa adalah kunci” dan anekdot yang menyebut bahwa presiden Indonesia harus berasal dari suku Jawa menemukan landasan ilmiah dan historisnya.

## **Kesimpulan**

Eksklusi sosial berbasis bahasa yang dialami mahasiswa asal Indonesia Timur di Pulau Jawa adalah konsekuensi langsung dari proses jawnisasi historis yang menghegemoni, yang telah menciptakan hierarki bahasa, rasisme struktural, dan prasangka diskriminatif. Meskipun telah mencapai pendidikan tinggi, mahasiswa asal Indonesia Timur menghadapi hambatan dalam berbahasa Indonesia formal dan vernakular, serta prasangka rasial yang memicu penarikan diri mereka dari lingkungan akademis maupun nonakademis, bahkan membuat mereka kesulitan dalam mengakses hak-hak mendasar seperti hak atas tempat tinggal yang layak. Studi ini memperkaya model siklus eksklusi multidimensi Bracic (2020, 2022) dengan secara eksplisit menyoroti peran sentral bahasa sebagai dimensi eksklusi dalam konteks Indonesia,

menegaskan bahwa bahasa, ideologi, dan kekuasaan saling berkelindan untuk melanggengkan ketidakadilan ini. Untuk memutus siklus eksklusif yang tak berkesudahan ini, diperlukan intervensi multidimensi yang tidak hanya menargetkan hierarki bahasa dan prasangka rasial, tetapi juga rasisme struktural, sekaligus mempromosikan kontak antargrup positif sebagaimana diusulkan Bracic (2020). Selain itu, negara perlu mengupayakan redefinisi dan rekognisi yang lebih bernuansa terhadap identitas dan kebudayaan Orang Timur sehingga dapat mendorong inklusi yang lebih setara.

### Daftar Pustaka

- Adellia, A. A., & Aco, F. (2020). Problematika Mahasiswa Indonesia Timur Dalam Menyesuaikan Budaya Di DIY. *Jurnal Enersia Publik: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik*, 4(2), 320–329.
- Anas, M., Frank, S. A. K., & Idris, U. (2020). Anana Bicara-Bicara: Selera Musik, Gaya Hidup, dan Strategi Rapper di Kota Jayapura. *Cenderawasih*, 1(1), 51–64.
- Anderson, B. R. O. G. (1990). *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Arka, I. W. (2013). *Language management and minority language maintenance in (eastern) Indonesia: strategic issues*.
- Awom, I. Y. P. (2017). Tafsiran Kognisi Puitis terhadap Lagu Black Brothers dalam Mengungkap Transkrip Tersembunyi (Hidden Transcript). *Melanesia*, 1(2), 91–106.
- Barimbing, S. K., & La Kahija, Y. F. (2015). Pengalaman Penyesuaian Sosial Mahasiswa Etnis Papua di Kota Semarang. *Jurnal Empati*, 4(2), 104–113.
- Basrianto, F. (2017). Kebangkitan Tradisi di Yogyakarta. *Masyarakat Indonesia*, 43(2), 187–200.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bracic, A. (2020). *Breaking the Exclusion Cycle: How to Promote Cooperation Between Majority and Minority Ethnic Groups*. Oxford: Oxford University Press.
- Bracic, A. (2022). Ethnicity and social exclusion. *Nationalities Papers*, 50(6), 1045–1056.
- Byrne, D. (2005). *Social Exclusion*. New York, NY McGraw-Hill Education.
- Daniels, T. P. (2024). Blackness in Indonesia: Articulations of colonial and postcolonial racial epistemologies. *Ethnos*, 89(4), 657–678.
- Dwiliarossa, M. (2019). *Representation of Eastern Indonesian Stereotype on Television Program (Semiotic Analysis of Charles Sanders Peirce in Waktu Indonesia Timur Television Program)* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Eagleton, T. (1991). *Ideology: An Introduction*. London: Verso.
- Fitri, R., & Kustanti, E. R. (2020). Hubungan antara efikasi diri akademik dengan penyesuaian diri akademik pada mahasiswa rantau dari Indonesia Bagian Timur di Semarang. *Jurnal Empati*, 7(2), 491–501.
- Fogg, K. W. (2015). The standardisation of the Indonesian language and its consequences for Islamic communities. *Journal of Southeast Asian Studies*, 46(1), 86–110.
- Garcia-Sanchez, I. M. (2011). Language Socialization and Exclusion. In A. Duranti, B. B. Schieffelin, & E. Ochs (Eds.), *The Handbook of Language Socialization* (pp. 391–419). Wiley.
- Ibda, H. (2019). Pembelajaran bahasa indonesia berwawasan literasi baru di perguruan tinggi dalam menjawab tantangan era revolusi industri 4.0. *Jalabahasa*, 15(1), 48–64.

- Kraus, S., Breier, M., Lim, W. M., Dabić, M., Kumar, S., Kanbach, D., Mukherjee, D., Corvello, V., Piñeiro-Chousa, J., Liguori, E., Palacios-Marqués, D., Schiavone, F., Ferraris, A., Fernandes, C., & Ferreira, J. J. (2022). Literature reviews as independent studies: guidelines for academic practice. *Review of Managerial Science*, 16(8), 2577–2595.
- Liamputtong, P., & Rice, Z. S. (2022). Stigma, Discrimination, and Social Exclusion. In P. Liamputtong (Ed.), *Handbook of Social Exclusion: Research and Practices in Health and Social Sciences* (pp. 113–128). Springer Nature Switzerland AG.
- Manafe, Y. C. S., & Kristianingsih, S. A. (2023). Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan Penyesuaian Sosial Mahasiswa Rantau Dari Indonesia Timur. *Media Bina Ilmiah*, 17(10), 2539–2548.
- Mulder, N. (2013). *Mistisisme Jawa: Ideologi di Indonesia* (5th ed.). LKiS Yogyakarta.
- Murdiyati, S. (2020). Peranan bahasa indonesia dalam membangun karakter generasi muda bangsa. *Educatif Journal of Education Research*, 2(3), 25–30.
- Musthofiyah, U., & Isnainiyah, L. (2020). What makes Indonesian Eastern students struggle on academic performance at urban college: A grounded theory. *EnJourMe (English Journal of Merdeka): Culture, Language, and Teaching of English*, 5(1), 16â – 30.
- Nurrahmah, F. (2023). Penguatan Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional Melalui Poster Interaktif pada Instagram@ BASTRA. ID. *Educaniora: Journal of Education and Humanities*, 1(1), 10–16.
- Perdana, A. D. (2022). *Stigmatisasi Terhadap Orang Timur Pada Film Dokumenter Dinasti Penagih Utang Dari Timur: The Debtfathers Karya Vice Indonesia* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Purnamasari, A., & Hartono, W. J. (2023). Pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. *Jotika Journal in Education*, 2(2), 57–64.
- Purwanti, A. (2023, August 26). *Ketimpangan di Tengah Apresiasi Publik pada Kinerja Edukasi*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/26/ketimpangan-di-tengah-apresiasi-publik-pada-kinerja-edukasi>
- Rahman, F. (2011, June). Bahasa dan kebijakan politik (kasus bahasa Mandarin di Indonesia). *Seminar Internasional Serumpun Melayu V*.
- Romaine, S. (2000). *Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics*. Oxford: OUP Oxford.
- Rosalia, M., Krisdinanto, N., & Fiesta, B. R. S. (2019). Analisis semiotika tentang penggambaran orang pedalaman pada film Indonesia. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 153–170.
- Salmon, C. (1983). *Literature in Malay by the Chinese of Indonesia, a Provisional Annotated Bibliography*. Editions de la Maison des sciences de l’homme.
- Seda, F. S. S. E., Setyawati, L., Pera, Y. H. T., & Febriani, R. (2018). Social policies, social exclusion & social well-being in Southeast Asia: A case study of Papua, Indonesia. *Economics & Sociology*, 11(3), 147–160.
- Thornton, D. L. (1972). *Javanization of Indonesian politics* [Thesis, The University of British Columbia]. <https://open.library.ubc.ca/collections/831/items/1.0101705>
- Webb-Gannon, C. (2023). # Papuanlivesmatter: how a narrative of racism has elevated West Papua’s decolonisation movement. *The International Journal of Human Rights*, 27(6), 1050–1073.
- Wijaya, A. R., & Rizal, C. A. (2023). Social Discrimination: A Case Study of Social Subordination to Eastern Vernacular Indonesian Speakers. *PRASASTI: Journal of Linguistics*, 8(1), 1–16.